

**UPAYA *GREENPEACE* DALAM MENGURANGI PERUBAHAN IKLIM**

**(STUDI KASUS PEMAKAIAN BATUBARA DI INDIA)**

**RESUME SKRIPSI**



**OLEH**

**LULU MALAHAYATI ANGKAT**

**151070220**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**YOGYAKARTA**

**2011**

## RESUM

### UPAYA *GREENPEACE* DALAM MENGURANGI PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS PEMAKAIAN BATUBARA DI INDIA)

Di zaman era globalisasi sekarang ini hampir semua negara membutuhkan energi untuk keberlangsungan ekonomi di negaranya, termasuk India. Penggunaan energi di India didominasi dengan pemakaian energi batubara, hampir 70% penggunaan batubara di India digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, padahal perlu diketahui bahwa pemakaian batubara lebih banyak 20% mempercepat perubahan iklim dibandingkan dengan energi lainnya.

Konsumsi dan produksi pemakaian batubara di India setiap tahun semakin meningkat, hal ini menyebabkan *Greenpeace* sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan berperan untuk mengintervensi kebijakan pemakaian batubara di India mengingat bahwa India merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian Protokol Kyoto untuk mengurangi perubahan iklim akan tetapi kenyataannya India menempati posisi ke 3 sebagai produsen dan konsumen batubara di dunia.

*Greenpeace* dalam upayanya untuk mengurangi pemakaian batubara di India menggunakan perwakilan langsung, demonstrasi, media massa, dan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat (LSM). Upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam menggunakan saluran khusus ternyata menimbulkan dua respon yang saling

bertentangan, dimana upaya-upaya tersebut ada yang membuahkan hasil dan ada yang tidak. Secara umum upaya yang dilakukan *Greenpeace* banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terbukti dengan adanya seorang Kalavati yang mampu mengimplementasikan visi-misi *Greenpeace* dalam penggunaan energi terbaru dari tenaga matahari di desanya. Berhasilnya demonstrasi yang dilakukan oleh *Greenpeace* melalui website dalam rangka memperingati hari bumi di India kemudian adanya kerjasama antara *Greenpeace* dengan BREDS dan PVCHR dalam mengaudit skema RGGVY untuk pengadaan listrik di desa-desa. *Greenpeace* berhasil membuka kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah tentang skema RGGVY. Pemerintah mengklaim bahwa pembangunan skema RGGVY sudah hampir rampung sebanyak 93%, namun fakta yang ada dilapangan hanya 10% yang masih terinstal.

Keberhasilan *Greenpeace* dapat terlihat dengan berhasilnya perwakilan langsung yang diutus *Greenpeace* untuk menyuarakan visi-misinya dalam konferensi yang mereka ikuti. Seperti dalam konferensi GoM *Greenpeace* beserta 27 LSM lainnya mendesak pemerintah untuk diberlakukannya daerah *Go-Zone* dan *No-Zone* sebagai pembatasan hutan margasatwa dan areal pertambangan tapi yang terjadi malah adanya penambahan areal hutan untuk pertambangan, namun hal itu direvisi ulang oleh pemerintah India.

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh *Greenpeace* secara bertubi-tubi kepada pemerintah India diharapkan mampu memberikan respon positif dari

pemerintah dalam menggunakan energi terbaru sebagai pengganti batubara. Namun sejauh ini respon pemerintah hanya sebatas pemberlakuan undang-undang.

. Pemerintah India dalam hal ini tidak dapat memutuskan sepenuhnya untuk pemberlakuan penghentian batubara menjadi energi terbaru, mengingat India merupakan negara perekonomian dan industrinya sedang berkembang pesat, yang 70% kebutuhan listrik untuk industri masih menggunakan batubara sehingga berat untuk pemerintah India memberlakukan energi terbaru pada saat ini, karena untuk melakukan pembangunan energi terbaru membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan industri India.

Keenganan pemerintah India dalam memberlakukan tuntutan yang diinginkan oleh *Greenpeace* didasari dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, dimana hampir 68% kemajuan ekonomi India didukung oleh kemajuan industri, padahal kemajuan industri tersebut didukung dengan pemakaian bahan batubara, ditambah lagi dengan bahan baku batubara hampir tersedia di setiap daerah di India, memiliki harga ekonomi yang cukup murah, dan pengelolanya yang mudah. Jika pemerintah India ingin menggunakan pemakaian energi terbaru sebagai pengganti energi batubara maka pemerintah India meski mengeluarkan dana yang begitu besar, disamping itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai pembangunannya sehingga dianggap belum efisien oleh pemerintah. Untuk mengimbangi pemakaian batubara dengan penggunaan energi terbaru, pemerintah India telah membangun pembangkit tenaga surya di wilayah Gurun Thara. Diharapkan dengan dibagunya pembangkit

tenaga surya tersebut maka dapat menghasilkan energi terbaru dari tenaga surya yang penggunaanya di aplikasikan didalam gedung pemerintah, rumah sakit, dan fasilitas publik umum.